

Inovasi Pemungutan Pajak Tanah Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui E-Banking Di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

Author :

Husnun Muallifah¹, Agni Grandita Permatasari²

Affiliation :

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia^{1,2}

Email:

husnunmuallifah@gmail.com¹, agni.grandita@ipdn.ac.id²

ABSTRAK

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tuntutan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah strategis memerlukan inovasi dalam sistem pemungutannya. Kabupaten Pasangkayu telah menerapkan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui layanan e-banking, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peningkatan PAD di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menentukan prioritas dan hubungan antar faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking belum berjalan secara efektif akibat rendahnya literasi digital wajib pajak, keterbatasan akses internet, belum optimalnya kerja sama dengan pihak perbankan dan penyedia sistem, serta kurangnya sosialisasi oleh aparat pemungut pajak. Analisis ISM mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses internet merupakan faktor penghambat utama dengan daya pengaruh tertinggi terhadap faktor lainnya. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pemanfaatan ISM untuk memetakan dan menentukan prioritas faktor penghambat inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking di tingkat pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inovasi; Pemungutan Pajak; E-Banking; PBB-P2

ABSTRAK

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tuntutan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah strategis memerlukan inovasi dalam sistem pemungutannya. Kabupaten Pasangkayu telah menerapkan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui layanan e-banking, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peningkatan PAD di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menentukan prioritas dan hubungan antar faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking belum berjalan secara efektif akibat rendahnya literasi digital wajib pajak, keterbatasan akses internet, belum optimalnya kerja sama dengan pihak perbankan dan penyedia sistem, serta kurangnya sosialisasi oleh aparat pemungut pajak. Analisis ISM mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses internet merupakan faktor penghambat utama dengan daya pengaruh tertinggi terhadap faktor lainnya. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pemanfaatan ISM untuk memetakan dan menentukan prioritas faktor penghambat inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking di tingkat pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inovasi; Pemungutan Pajak; E-Banking; PBB-P2.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri, dengan tujuan memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, pajak daerah menjadi instrumen strategis dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (Khalida et al., 2025), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang secara normatif memiliki basis objek pajak yang luas dan potensi penerimaan yang berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi sistem pemungutan pajak melalui layanan elektronik, termasuk e-banking, dipandang sebagai inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu daerah otonom dengan PBB-P2 sebagai sumber pajak potensial dengan kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menghadapi permasalahan serius. Meskipun jumlah objek pajak terus meningkat, tingkat realisasi pemungutan relatif rendah dan belum stabil.

Tabel 1. Jumlah objek PBB-P2 di Kabupaten Pasangkayu

No.	Tahun	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak telah dipungut	% Objek Pajak yang belum dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2023	59.635	15.895	74
2.	2022	59.337	15.413	74
3.	2021	57.280	15.019	74
4.	2020	46.258	29.442	36

Source: BPKAD Kab. Pasangkayu

Pada tahun 2023, lebih dari 70 persen objek PBB-P2 yang terdaftar belum berhasil dipungut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi fiskal dan capaian penerimaan aktual, yang tidak hanya mencerminkan persoalan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menunjukkan keterbatasan sistem dan kapasitas pengelolaan pemungutan pajak daerah. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu telah mengimplementasikan inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah akses pembayaran pajak, mengurangi biaya transaksi, serta mendorong pergeseran perilaku wajib pajak menuju sistem pembayaran non-tunai. Secara konseptual, penerapan e-banking selaras dengan teori inovasi pelayanan publik yang menekankan keunggulan relatif, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dapat diamati secara langsung. Namun dalam praktiknya, implementasi e-banking PBB-P2 di Kabupaten Pasangkayu belum menunjukkan dampak yang optimal terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji digitalisasi pelayanan publik dan inovasi pemungutan pajak daerah, dengan temuan bahwa teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak (Asia Fahlevi, 2024). Namun sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat umum, berfokus pada aspek teknis sistem atau capaian output layanan, serta belum secara mendalam menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi inovasi pada konteks daerah dengan karakteristik geografis, infrastruktur, dan literasi digital yang beragam. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum memetakan hubungan struktural antar faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas inovasi pemungutan pajak berbasis e-banking.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik menganalisis inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking dengan menekankan identifikasi dan prioritisasi faktor-faktor penghambat implementasi di tingkat daerah. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat keberhasilan inovasi digital dalam pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking di Kabupaten Pasangkayu, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

utama yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat kontribusi PBB-P2 terhadap peningkatan PAD. Dengan mengaitkan tujuan penelitian pada gap penelitian yang ada, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian inovasi perpajakan daerah serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemungutan pajak yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

KERANGKA TEORITIS

a. Teori Inovasi

Menurut Everett Rogers, inovasi melibatkan adopsi dan penyebaran ide, produk, atau praktik baru yang menciptakan perubahan sosial. Inovasi dalam pelayanan publik harus menunjukkan:

- Keuntungan relatif: manfaat yang jelas dibandingkan praktik sebelumnya.
- Kompatibilitas: penyelarasan dengan sistem yang ada untuk memudahkan transisi.
- Kompleksitas: tingkat kesulitan yang dapat diterima dalam penggunaan.
- Uji coba: kemungkinan untuk menguji sebelum adopsi penuh.
- Observabilitas: hasil yang terlihat yang menunjukkan manfaatnya (Rogers dalam Jatmiko, 2023).

Inovasi dalam perpajakan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung modernisasi pemungutan pajak, seperti yang terlihat dalam pengenalan sistem e-banking untuk pembayaran pajak (Agustia, 2017).

b. Konsep Perpajakan

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib, yang diberlakukan secara hukum tanpa pengembalian langsung, untuk mendanai pengeluaran publik. Pajak daerah (pajak daerah) dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Juliarini, 2020).

PBB-P2 adalah pajak daerah yang dipungut berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau entitas, tidak termasuk lahan yang ditujukan untuk kegiatan pertambangan, kehutanan, atau Perkebunan (Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalangi, 2019).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Tiga sistem pemungutan pajak diakui:

- Sistem Penilaian Resmi: otoritas menentukan pajak yang harus dibayar.
- Sistem Penilaian Mandiri: wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri.
- Sistem Pemotongan: pihak ketiga menentukan dan menyetorkan pajak (Juliarini, 2020).

Teori-teori seperti Teori Asuransi, Teori Manfaat, Teori Kemampuan Membayar, dan Teori Kewajiban menekankan bahwa perpajakan bukan hanya alat fiskal tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

d. E-Perbankan

E-banking masa kini merupakan komponen penting yang mengacu pada penyampaian layanan perbankan menggunakan saluran digital seperti internet banking (Lestari et al., 2025), mobile banking, phone banking, ATM, dan perangkat untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan aksesibilitas. Teknologi ini memungkinkan wajib pajak membayar pajak tanpa mengunjungi kantor fisik, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan.

e. Pendapatan Daerah (PAD)

PAD (Pendapatan Asli Daerah) mewakili pendapatan yang bersumber dari sumber daya lokal terutama pajak daerah, retribusi, dan aset daerah yang kemudian menjadi sumber pembiayaan daerah (Ujianto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin, 2017). PAD yang lebih tinggi mencerminkan independensi fiskal yang lebih besar dari suatu wilayah. Penguatan pengumpulan PBB-P2 merupakan salah satu strategi paling signifikan untuk meningkatkan PAD dan memastikan pembangunan lokal yang berkelanjutan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi penalaran induktif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam (Fadli, 2021), mengenai implementasi inovasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui e-banking di Kabupaten Pasangkayu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi proses, pengalaman, serta persepsi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi kebijakan publik pada konteks alamiah. Penalaran induktif diterapkan dengan menarik generalisasi konseptual berdasarkan temuan empiris di lapangan, dimulai dari pengamatan spesifik terhadap praktik pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking hingga penyusunan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan pengujian hubungan kausal antar variabel, sehingga analisis dapat difokuskan pada dinamika implementasi inovasi dan hambatan yang dihadapi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Kerangka Konseptual dan perasionalisasi

Penelitian ini menggunakan **Teori Difusi Inovasi** yang dikemukakan oleh Rogers sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis adopsi dan efektivitas inovasi pembayaran

PBB-P2 melalui e-banking. Teori ini relevan karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai penerimaan dan penyebaran inovasi dalam sistem sosial.

Operasionalisasi konsep berfokus pada lima atribut utama inovasi seperti yang diusulkan oleh Rogers:

1. **Keunggulan Relatif** – sejauh mana inovasi e-banking menunjukkan manfaat yang jelas seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas dibandingkan dengan metode konvensional.
2. **Kompatibilitas** – sejauh mana inovasi selaras dengan kebutuhan wajib pajak dan sistem yang ada.
3. **Kompleksitas** – kemudahan atau kesulitan menggunakan inovasi.
4. **Uji coba** – sejauh mana inovasi dapat diuji dalam skala terbatas sebelum implementasi penuh.
5. **Observabilitas** – visibilitas hasil yang menunjukkan manfaat inovasi

Kelima atribut tersebut dijadikan dimensi analisis yang diterjemahkan ke dalam indikator-indikator operasional untuk memandu proses pengumpulan data, pengkodean, serta penafsiran temuan terkait implementasi sistem e-banking PBB-P2 di Kabupaten Pasangkayu.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama informasi .

- **Data primer** diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur dengan enam informan kunci, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi perannya dalam sistem pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking etc, 2022), dengan rincian sebagai berikut:
 - Dua orang pejabat/staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menangani pemungutan dan inovasi PBB-P2;
 - Satu orang staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berperan dalam pengelolaan data dan pendapatan daerah;
 - Satu orang staf yang menangani dengan mitra perbankan, yang terlibat langsung dalam penyediaan layanan e-banking PBB-P2;
 - Dua orang wajib pajak, yang telah menggunakan layanan pembayaran PBB-P2 melalui e-banking.
- **Data sekunder** terdiri dari laporan dan catatan resmi, seperti:
 - Target and realization of PAD (Pendapatan Asli Daerah) for Pasangkayu Regency (2019–2024);
 - Target dan realisasi pendapatan PBB-P2 untuk periode yang sama;
 - Catatan wajib pajak terdaftar (*dengan nama*) di kabupaten;
 - Laporan kinerja ekonomi (PDRB) dari tahun 2021 hingga Agustus 2024.

Data sekunder terutama bersumber dari BPKAD dan Bapenda untuk melengkapi dan memvalidasi temuan lapangan.

Seleksi Informan

Penentuan informan dilakukan menggunakan **purposive sampling**, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Campbell et al., 2020). Kriteria tersebut meliputi keterlibatan langsung dalam perumusan, pelaksanaan, atau pemanfaatan sistem e-banking PBB-P2. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat informatif, mendalam, dan kontekstual.

Peneliti sebagai Instrumen

Sejalan dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti bertanggung jawab untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan, merancang dan melakukan wawancara, mengatur dan menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Pendekatan refleksif ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan penelitian dengan kondisi lapangan dengan tetap memastikan pengumpulan dan interpretasi informasi yang sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan metode triangulasi untuk meningkatkan keandalan temuan, menggabungkan:

1. Wawancara Terstruktur – dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan fokus selama diskusi dengan informan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa aspek-aspek kunci dari masalah penelitian ditangani secara komprehensif.
2. Tinjauan Dokumentasi – melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen resmi yang relevan seperti peraturan setempat, laporan, data statistik, dan dokumentasi program dari sumber primer (terkait lapangan) dan sekunder (pemerintah dan akademik).

Integrasi metode ini memfasilitasi validasi silang informasi dan membantu meminimalkan potensi bias.

Analisis Data

Analisis data mengikuti **pendekatan dua tingkat**:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif dengan penalaran Induktif Miles dan Huberman

Analisis data tersebut terdiri atas empat tahap. Pertama, tahap reduksi data, hasil wawancara ditranskripsi dan kemudian dilakukan proses open coding, yaitu pemberian kode awal pada unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman dalam Qomaruddin, 2024). Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan melalui axial coding ke dalam kategori tematik yang merepresentasikan atribut inovasi dan faktor penghambat implementasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun matriks tematik dan narasi analitis untuk memperlihatkan pola hubungan antar kategori. Selanjutnya, pada tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan,

interpretasi awal diuji kembali melalui pembandingan antar sumber data dan hasil dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan

2. Interpretative Structural Modelling (ISM)

Untuk mengidentifikasi faktor penghambat prioritas dalam faktor-faktor yang menghambat keberhasilan inovasi e-banking, diterapkan ISM. Metode ini, yang dikembangkan oleh Warfield 1973 (Rusydiana, 2018), membantu memetakan keterkaitan yang kompleks antara unsur-unsur dalam suatu sistem.

Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. **Identifikasi Sistem:** mengidentifikasi komponen relevan yang memengaruhi pengumpulan PBB-P2 berbasis e-banking, termasuk peraturan, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
2. **Pembentukan Hubungan Kontekstual:** mengumpulkan data melalui wawancara atau kuesioner untuk memahami bagaimana satu faktor mempengaruhi faktor lain. Hubungan diklasifikasikan sebagai:
V: faktor i mempengaruhi faktor j ;
A: faktor j mempengaruhi faktor i ;
X: saling berpengaruh;
O: tidak ada hubungan langsung.
3. **Matriks Interaksi Diri Struktural (SSIM):** membangun matriks untuk mewakili hubungan antar faktor.
4. **Matriks Keterjangkauan:** mengubah SSIM menjadi matriks yang mencerminkan hubungan langsung dan tidak langsung.
5. **Diagram ISM dan Pemodelan Hierarkis:** memvisualisasikan hubungan struktural dan menentukan posisi hierarkis dari setiap faktor.
6. **Analisis MICMAC (Perkalian Matriks Lintas Dampak Diterapkan pada Klasifikasi):** mengklasifikasikan variabel berdasarkan kekuatan pendorong dan ketergantungannya untuk mengidentifikasi faktor mana yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu.

Hasil SSIM, reachability matrix, model ISM, dan analisis MICMAC disajikan secara visual dalam bagian Hasil dan Pembahasan sebagai dasar verifikasi struktur hubungan antar faktor penghambat.

HASIL DAN DISKUSI

1. Konteks Desentralisasi Fiskal dan Perpajakan Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan mereka sendiri dalam mendanai pembangunan. Di antara berbagai pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memainkan peran

penting karena basis pembayar pajaknya yang luas khususnya di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Meskipun desentralisasi fiskal dan pengalihan pengelolaan

PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, efisiensi penagihan tetap tidak optimal karena tantangan struktural, teknologi, dan perilaku sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan pemungutan pajak berbasis e-banking, yang bertujuan untuk memodernisasi pemberian layanan, memperluas akses bagi wajib pajak, dan meningkatkan kinerja pendapatan. Inovasi ini menanggapi isu-isu kritis dalam sistem manual tradisional, yang ditandai oleh proses birokrasi yang panjang bagi wajib pajak; hambatan geografis dan biaya transaksi yang tinggi bagi penduduk pedesaan; mobilisasi kolektor lapangan yang tidak efisien; Tingkat kepatuhan yang rendah dan kesadaran yang terbatas di antara pembayar pajak.

2. Kinerja Pendapatan PBB-P2

Dalam penelitian ini, kinerja pendapatan PBB-P2 mencerminkan potensi dan kelemahan yang terus-menerus dalam sistem perpajakan daerah Kabupaten Pasangkayu. Meskipun

PBB-P2 telah menjadi salah satu aliran pendapatan yang paling stabil, selama lima tahun terakhir mengungkapkan kendala yang membatasi realisasi penuh potensinya. Data dalam Tabel 2 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun umumnya naik dalam penerimaan

PBB-P2 tahunan.

Tabel 2. Potensi pajak di Kabupaten Pasangkayu

Jenis Pajak	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Jan–Sep, Rp)
Pajak Hotel	24,567,000	34,511,337	50,094,000	79,002,500	45,090,409
Pajak Restoran	461,794,969	562,039,116	403,544,406	691,489,116	880,355,561
Pajak Periklanan	74,657,828	153,458,000	376,774,764	670,179,206	438,749,883
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5,562,175,567	6,270,497,433	7,182,926,623	8,353,900,077	6,948,551,045
Pajak Sarang Burung Walet	1,231,293,567	2,109,837,790	1,590,315,184	4,704,843,097	5,108,101,379
PBB-P2	1,003,648,492	1,565,826,908	1,684,265,732	1,729,823,638	705,010,420

Source: BPKAD Pasangkayu, 2024

Meskipun penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan dari Rp1,00 miliar pada 2020 menjadi Rp1,73 miliar pada 2023, pertumbuhan tersebut relatif tertinggal dibandingkan pajak daerah lain seperti Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet yang bersifat lebih otomatis dan tidak sepenuhnya bergantung pada kepatuhan individual. Lonjakan awal PBB-P2 beriringan dengan implementasi pembayaran berbasis e-banking mengindikasikan adanya peningkatan kemudahan dan efisiensi transaksi, namun penurunan tajam

realisasi pada 2024-September yang hanya mencapai Rp705 juta, menegaskan bahwa inovasi digital belum mampu membuka potensi pendapatan penuh PBB-P2, temuan ini menunjukkan bahwa e-banking berperan sebagai faktor pendukung meskipun teknologi memfasilitasi akses dan efisiensi, keuntungan jangka panjang bergantung pada kesiapan sistem yang lebih luas, termasuk pembaruan administrasi, penjangkauan infrastruktur, dan strategi perubahan perilaku di antara pembayar pajak.

3. Kontribusi PBB-P2 untuk PAD

Bobot relatif PBB-P2 dalam kapasitas fiskal lokal adalah dimensi kunci lainnya dari kinerjanya. Tabel 3 Merangkum kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir:

Tabel 3. Realisasi PBB-P2 dalam Penerimaan Daerah Asli Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2024

Tahun	PBB-P2 Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2020	1,750,000,000	1,003,648,492	57.35	39,536,365,299.95	3%
2021	1,750,000,000	1,565,826,908	89.48	41,195,629,636.66	4%
2022	1,750,000,000	1,684,265,732	96.24	46,833,564,003.12	4%
2023	1,850,000,000	1,729,823,638	93.50	59,370,848,813.46	3%
2024*	2,500,000,000	705,010,420	28.20	40,693,772,421.83	2%

*January–September2024

Source: BPKAD Pasangkayu, 2024

Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2020–2023 namun, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap rendah dan persentase pencapaian target fluktuatif serta tidak pernah mencapai 100%. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, pajak daerah idealnya menjadi instrumen utama kemandirian fiskal karena memiliki basis lokal yang luas dan stabil. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknologi berfungsi sebagai faktor pendukung, bukan penentu utama, dalam meningkatkan kinerja pajak daerah. Dengan demikian, penguatan peran PBB-P2 dalam PAD memerlukan integrasi reformasi teknologi, pembaruan data objek pajak, dan penguatan kelembagaan agar sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah. Dari perspektif desentralisasi fiskal, kasus Pasangkayu menggambarkan bahwa pajak lokal strategis dengan basis yang luas dapat tetap berkinerja buruk jika faktor penghambat tidak ditangani.

4. Cakupan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, salah satu penentu kinerja pendapatan PBB-P2 yang paling kritis di Kabupaten Pasangkayu adalah kesenjangan antara jumlah objek pajak yang terdaftar dengan

proporsi yang berhasil dikumpulkan setiap tahunnya. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan yang lebih dalam, baik dalam kapasitas administrasi maupun kepatuhan wajib pajak, yang tetap ada meskipun telah diterapkan inovasi pembayaran digital.

Tabel 4. Objek PBB-P2 dan Tingkat Kepatuhan (2020–2023)

Tahun	Total Objek PBB-P2 Terdaftar	Objek yang Dikumpulkan	Tidak dikumpulkan (%)
2020	46,258	29,442	36%
2021	57,280	15,019	74%
2022	59,337	15,413	74%
2023	59,635	15,895	73%

Source: Bapenda Pasangkayu, 2024

Jumlah objek PBB-P2 terdaftar di Kabupaten Pasangkayu meningkat signifikan sebesar hampir 29% dalam periode 2020–2023, ekspansi basis pajak tersebut tidak diikuti oleh peningkatan tingkat pengumpulan, yang justru mengalami kontraksi tajam dan stagnan pada kisaran 26–27%. Pola ini menunjukkan kegagalan transformasi administratif, di mana keberhasilan ekstensifikasi pajak tidak mampu dikonversi menjadi intensifikasi penerimaan. Adopsi e-banking memang meningkatkan kemudahan transaksi, namun dampaknya terbatas secara spasial dan sosial, terutama terkonsentrasi pada wajib pajak perkotaan yang memiliki akses digital, sehingga memperlebar kesenjangan kepatuhan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya kepatuhan bukan semata persoalan pilihan individu wajib pajak, melainkan cerminan dari hambatan struktural yang mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, lemahnya pembaruan data administrasi (NJOP), serta absennya mekanisme penegakan yang efektif. Dengan demikian, inovasi digital dalam pemungutan PBB-P2 bersifat necessary but not sufficient, karena tanpa penguatan kelembagaan, edukasi perilaku, dan penegakan hukum, perluasan basis pajak hanya menghasilkan “kepatuhan semu” yang tidak berdampak nyata pada kinerja fiskal daerah.

5. Evaluasi Inovasi E-Banking

Inovasi dinilai menggunakan **Lima Atribut Inovasi Rogers**:

1. Keuntungan Relatif:

E-banking mengurangi perjalanan dan waktu tunggu wajib pajak, meningkatkan kenyamanan, dan menurunkan biaya transaksi.

2. Kompatibilitas:

Sistem ini lebih cocok untuk pembayar pajak perkotaan dengan akses ke layanan perbankan. Wajib pajak pedesaan menghadapi tantangan karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

3. Kompleksitas:

Antarmuka umumnya ramah pengguna untuk pembayar pajak yang melek digital tetapi menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang lebih tua dan pedesaan.

4. Uji coba:

Program percontohan awal di daerah perkotaan memberikan bukti konsep tetapi memiliki jangkauan terbatas ke daerah pedesaan.

5. Observabilitas:

Manfaat seperti konfirmasi pembayaran yang lebih cepat dan pengurangan antrian terlihat jelas oleh pengadopsi awal, memfasilitasi difusi bertahap.

Meskipun inovasi menawarkan efisiensi dan transparansi, adopsi tidak merata di seluruh kelompok demografis dan geografis karena hambatan infrastruktur yang belum merata.

6. Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Beberapa faktor penghambat diidentifikasi melalui pengamatan lapangan dan wawancara informan:

- 1) Infrastruktur teknologi informasi (jaringan, atm);
- 2) Literasi Digital Masyarakat
- 3) Sosialisasi dan Edukasi
- 4) Ketersediaan sarana elektronik masyarakat untuk pembayaran E-Bangking (HP).
- 5) Kerja sama dengan pihak lain (vendor penyedia sistem, perbankan yang menangani pembayaran PBB-P2).
- 6) Kompetensi SDM Aparatur Pajak.

7. Analisis Kualitatif Miles–Huberman dan ISM tentang Faktor Penghambat

Studi ini menggunakan Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk memetakan keterkaitan antar faktor penghambat dan menerapkan analisis MICMAC untuk mengklasifikasikannya berdasarkan kekuatan penggerak dan ketergantungan (Rusydiana, 2018). Namun, ISM tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dari hasil coding kualitatif yang sistematis sehingga struktur hubungan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat. Penelitian ini mengombinasikan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dengan Interpretative Structural Modelling (ISM) secara berurutan dan saling terintegrasi. Analisis Miles–Huberman digunakan untuk mengidentifikasi dan memformulasikan faktor penghambat, sedangkan ISM digunakan untuk memetakan hubungan struktural dan prioritas antar faktor.

Tahap 1. Identifikasi Sistem (System Identification)

Tahap pertama dilakukan dengan **mengidentifikasi elemen sistem**, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pengumpulan PBB-P2 berbasis e-banking di Kabupaten Pasangkayu.

Proses ini dilakukan melalui:

1. Wawancara terstruktur dengan enam informan kunci (Bapenda, BPKAD, staf yang bermitra dengan perbankan, dan wajib pajak);
2. Studi dokumentasi terhadap laporan kinerja, data PBB-P2, dan regulasi terkait.

Analisis kualitatif Miles dan Huberman, Pada tahap ini diterapkan open coding, yaitu:

- Transkrip wawancara dibaca berulang;
- Setiap pernyataan yang mengandung hambatan, kendala, atau faktor penentu diberi kode awal;
- Kode-kode serupa dikelompokkan (axial coding) menjadi tema besar.

Hasil coding menghasilkan sejumlah faktor penghambat utama, yang kemudian ditetapkan sebagai elemen sistem ISM, mencakup:

- 1) Infrastruktur teknologi informasi (jaringan, atm);
- 2) Literasi Digital Masyarakat
- 3) Sosialisasi dan Edukasi
- 4) Ketersediaan sarana elektronik masyarakat untuk pembayaran E-Bangking (HP).
- 5) Kerja sama dengan pihak lain (vendor penyedia sistem, perbankan yang menangani pembayaran PBB-P2).
- 7) Kompetensi SDM Aparatur Pajak.
- 8) Dengan demikian, elemen ISM bukan asumsi peneliti, tetapi hasil langsung dari proses coding Miles–Huberman.

Tahap 2. Pembentukan Hubungan Kontekstual

Setelah elemen sistem ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan kontekstual antar faktor. Hubungan ini diperoleh melalui:

- Pendalaman wawancara dengan informan ahli (expert judgment);
- Diskusi terarah mengenai pengaruh satu faktor terhadap faktor lainnya.

Hubungan antar faktor diklasifikasikan menggunakan notasi standar ISM:

- **V**: faktor i memengaruhi faktor j ;
- **A**: faktor j memengaruhi faktor i ;
- **X**: kedua faktor saling memengaruhi;
- **O**: tidak terdapat hubungan langsung.

Penilaian hubungan ini bersifat **interpretatif tetapi berbasis bukti lapangan**, karena informan yang dilibatkan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan PBB-P2.

Tahap 3. Penyusunan Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)

Berdasarkan hubungan kontekstual tersebut, disusun Structural Self-Interaction Matrix (SSIM). SSIM merepresentasikan:

- Seluruh pasangan faktor penghambat;
- Arah dan sifat hubungan antar faktor menggunakan simbol V, A, X, dan O.

SSIM ini disajikan pada gambar 1.

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## [1,] NA   "V"  "V"  "V"  "A"  "V"
## [2,] NA   NA   "A"  "V"  "V"  "V"
## [3,] NA   NA   NA   "V"  "V"  "A"
## [4,] NA   NA   NA   NA   "X"  "V"
## [5,] NA   NA   NA   NA   NA   "V"
## [6,] NA   NA   NA   NA   NA   NA
```

Gambar 1. SSIM

Tahap 4. Penyusunan Reachability Matrix

SSIM kemudian dikonversi menjadi **Reachability Matrix**, dengan mengubah simbol:

- V, A, X, O menjadi nilai biner (1 dan 0),
- serta menerapkan prinsip **transitivity** (jika $A \rightarrow B$ dan $B \rightarrow C$, maka $A \rightarrow C$).

Hasil konversi dan finalisasi disajikan pada gambar 2.

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## [1,] 1   1   1   1   0   1
## [2,] 0   1   0   1   1   1
## [3,] 0   1   1   1   1   0
## [4,] 0   0   0   1   1   1
## [5,] 1   0   0   1   1   1
## [6,] 0   0   1   0   0   1
```

Gambar 2. Initial Reachability Matrix

Matriks ini menunjukkan:

- Hubungan langsung dan tidak langsung;
- Kekuatan keterkaitan antar faktor secara struktural.

Tahap 5. Level Partitioning dan Model Hierarkis ISM

Reachability matrix selanjutnya dianalisis melalui partitioning setiap iterasi untuk menentukan:

- Level hierarki masing-masing faktor;
- Posisi faktor sebagai pendorong utama atau faktor turunan.

Dalam proses ini, disusun **diagram hierarki ISM**, yang memperlihatkan:

- Faktor dasar (driver variables) berada pada level bawah;
- Faktor yang bergantung berada pada level atas hingga dihasilkan final reachability matrix.

```
##   A1 A2 A3 A4 A5 A6
## A1  1  1  1  1  1  1
## A2  0  1  0  1  1  1
## A3  0  1  1  1  1  1
## A4  0  0  0  1  1  1
## A5  1  0  0  1  1  1
## A6  0  0  1  0  0  1
```

Gambar 3. Final Reachability Matrix

Hasil menunjukkan bahwa **keterbatasan infrastruktur teknologi informasi (jaringan, atm)**, berada pada level dasar sebagai **faktor penggerak utama** yang memengaruhi faktor lain.

Tahap 6. Analisis MICMAC

Tahap akhir adalah MICMAC analysis, yang mengklasifikasikan faktor berdasarkan:

- **Driving power** (daya pengaruh);
- **Dependence power** (tingkat ketergantungan).

Hasil MICMAC membagi faktor ke dalam empat kuadran:

1. Variabel Otonom (Autonomous):

Variabel dalam kategori ini memiliki pengaruh yang rendah terhadap variabel lain serta tidak terlalu bergantung pada variabel lainnya. Meskipun memiliki beberapa hubungan dengan sistem, keterkaitannya tidak begitu kuat. Variabel ini berada di Kuadran I. Dalam penelitian ini, semua variabel faktor penghambat tersebut tidak termasuk dalam kategori ini.

2. Variabel Dependen (Dependent):

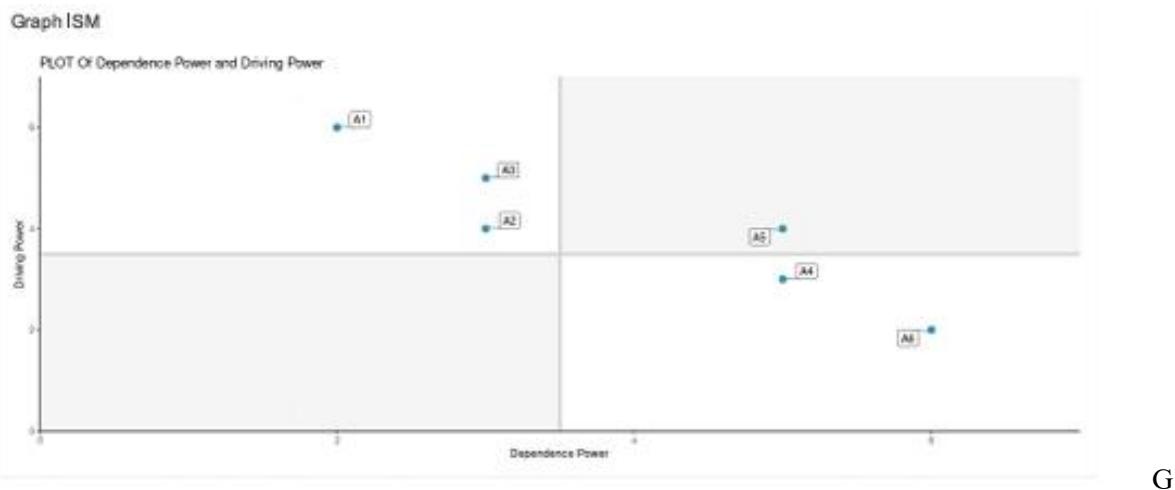
Variabel dalam Kuadran II ini memiliki pengaruh yang lemah tetapi sangat bergantung pada variabel lain. Berdasarkan analisis MICMAC, faktor penghambat 4 dan 6 termasuk dalam kelompok variabel dependen.

3. Variabel Penghubung (Linkage):

Variabel ini memiliki pengaruh yang besar sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap variabel lain. Artinya, setiap perubahan pada variabel ini akan memengaruhi variabel lain yang ada di atasnya serta memberikan efek balik pada dirinya sendiri. Variabel ini berada di Kuadran III. Dalam penelitian ini, enabler 5 termasuk dalam kategori ini, seperti pembaruan data dan teknologi informasi.

4. Variabel Independen (Independent):

Variabel ini memiliki pengaruh yang kuat tetapi tidak terlalu bergantung pada variabel lain. Variabel ini berada di Kuadran IV. Dalam penelitian ini, enabler 1, 3, dan 2 yaitu Infrastruktur teknologi informasi (jaringan, atm); literasi digital masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi.



Gambar 4. Analisis MICMAC Faktor Penghambat Penerapan Inovasi Pemungutan PBB-P2 Melalui E-Bangking

Analisis ini memperkuat temuan bahwa perbaikan infrastruktur teknologi informasi (jaringan, atm) merupakan titik masuk strategis untuk meningkatkan efektivitas inovasi e-banking PBB-P2.

8. Pembahasan Implikasi

Hasil Analisis Interpretative Structural Modelling (ISM)

Interpretative Structural Modelling (ISM) digunakan untuk mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis keterkaitan antar faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis e-banking di Kabupaten Pasangkayu. Proses analisis ISM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan Structural Self-Interaction Matrix (SSIM), pembentukan matriks keterjangkauan (reachability matrix), proses pemartisian level, hingga pembangunan model struktural hierarkis. Berdasarkan hasil SSIM dan matriks keterjangkauan akhir, faktor-faktor penghambat tersusun dalam beberapa tingkat hierarki yang menunjukkan tingkat pengaruh relatif masing-masing faktor dalam sistem. Hasil pemartisian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, khususnya jaringan, berada pada tingkat hierarki paling bawah. Posisi ini mengindikasikan bahwa infrastruktur digital berperan sebagai faktor pendorong utama (driver) yang memengaruhi munculnya faktor penghambat lainnya.

Pada tingkat menengah, ditemukan faktor-faktor seperti literasi digital wajib pajak, koordinasi antarinstansi, serta integrasi teknis antara Bapenda dan mitra perbankan. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai variabel penghubung (linkage variables) karena memiliki hubungan timbal balik, baik memengaruhi maupun dipengaruhi oleh faktor lain dalam sistem. Sementara itu, pada tingkat hierarki paling atas terdapat faktor-faktor seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterlambatan administrasi, dan kurang efektifnya kegiatan sosialisasi. Faktor-faktor tersebut merupakan variabel terpengaruh

(dependent variables) yang cenderung muncul sebagai akibat dari permasalahan struktural yang lebih mendasar, bukan sebagai penyebab utama. Model hierarki ISM yang dihasilkan dengan demikian menunjukkan adanya pola hubungan sebab-akibat, di mana perbaikan pada faktor-faktor dasar di level bawah berpotensi menghasilkan dampak berantai yang positif terhadap faktor-faktor di level atas.

Temuan ISM menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking bersifat sistemik, bukan berdiri sendiri. Permasalahan yang selama ini tampak dominan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak atau lemahnya sosialisasi, sesungguhnya merupakan manifestasi dari keterbatasan yang lebih fundamental, terutama pada aspek infrastruktur digital dan kesiapan sistem. Hasil ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang menekankan bahwa keberhasilan adopsi inovasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan ekosistem, termasuk ketersediaan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan pengguna (Sinaga et al., 2024). Dalam konteks Kabupaten Pasangkayu, ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi faktor krusial yang menghambat difusi dan pemanfaatan layanan e-banking secara merata. Hasil MICMAC mempertegas bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan titik ungkit utama (leverage point) dalam meningkatkan efektivitas inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking. Intervensi kebijakan yang berfokus pada faktor pendorong diperkirakan akan memberikan dampak paling signifikan dan berkelanjungan terhadap sistem secara keseluruhan.

Selain itu, dominasi variabel penghubung menunjukkan bahwa upaya perbaikan harus dilakukan secara terpadu dan simultan. Pendekatan parsial, seperti peningkatan sosialisasi tanpa disertai penguatan akses dan literasi digital, cenderung tidak menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

Kombinasi analisis ISM dan MICMAC memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur permasalahan dalam implementasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking di Kabupaten Pasangkayu. Hasil penelitian menegaskan bahwa keterbatasan efektivitas inovasi tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor struktural dan teknologi, bukan semata-mata oleh resistensi perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang direkomendasikan meliputi:

- Perluasan dan pemerataan infrastruktur digital, khususnya di wilayah perdesaan;
- Penguatan literasi digital bagi wajib pajak dan aparatur;
- Peningkatan koordinasi kelembagaan serta integrasi sistem dengan mitra perbankan.

Dengan memperkuat faktor-faktor dasar tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi peningkatan kepatuhan, efisiensi pemungutan, dan keberlanjutan inovasi perpajakan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis e-banking di Kabupaten Pasangkayu telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran, terutama pada tahap awal implementasi dan di wilayah

perkotaan. Namun, inovasi tersebut belum mampu mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari fluktuasi penerimaan, stagnasi kontribusi PAD, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah perdesaan.

Integrasi analisis kualitatif Miles-Huberman dengan Interpretative Structural Modelling (ISM) dan analisis MICMAC mengungkap bahwa hambatan utama inovasi bersifat struktural dan sistemik. Keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital wajib pajak muncul sebagai faktor pendorong utama yang memengaruhi faktor-faktor lain, seperti lemahnya sosialisasi, keterlambatan administrasi, rendahnya kepatuhan, serta kurang optimalnya koordinasi kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan yang tampak pada level operasional merupakan konsekuensi dari keterbatasan mendasar pada kesiapan ekosistem inovasi.

Secara konseptual, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan inovasi perpajakan daerah tidak dapat bergantung pada teknologi semata, melainkan memerlukan dukungan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan perubahan perilaku wajib pajak secara simultan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking menuntut strategi kebijakan yang terintegrasi, dengan memprioritaskan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta koordinasi antarinstansi, guna mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdul Rahman; Ni made wirastika sari; Fitriani; Mochammad Sugiarto; Sattar, Zainal A; Irwanto; anton; indriana; nurjanna l; eko h, ade putra o de; ahmadin; amtai a. (2022). *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*.
- Agustia, I. (2017). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Elektronik (E-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 3–4.
- Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalangi, J. D. L. W. (2019). *ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN MALALAYANG*. 14(September 2009).
- asia fahlevi, S. (2024). *OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDUNG*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing : JRN*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Jatmiko, M. H. (2023). *PENGARUH RELATIVE ADVANTAGE , COMPATIBILITY , COMPLEXITY , OBSERVABILITY DAN TRIALABILITY TERHADAP INTENTION TO USE PADA E-WALLET DANA*. 12, 538–553. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i2.780>
- Juliarini, A. (2020). *KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI*

INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 13.

Khalida, K., Riska, M., Ajianing, N. A., Islam, U., Sumatera, N., Estate, M., & Serdang, D. (2025). *Strategi efektivitas pemungutan pajak daerah dan pajak negara untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.* 3(6).

Lestari, P. A., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). *TRANSFORMASI DIGITAL BANKING : MANFAAT DAN RISIKO TRANSAKSI ONLINE MODERN (INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING) TRANSFORMASI DIGITAL BANKING : MANFAAT DAN RISIKO TRANSAKSI ONLINE MODERN (INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING).* 3(4).

Qomaruddin, H. S. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.* 1(2).

Rusydiana, A. (2018). Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 5. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771>

Sinaga, E. M., Muhammad, K. M. S., Fauzi, A., Pgisd, P., Keguruan, F., Universitas, P., Santo, K., & Medan, T. (2024). *Literature Review : Sasaran Difusi Inovasi dalam Lingkup Pendidikan Dasar.* 17(1).

Ujianto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin. (2017). *KEUANGAN NEGARA Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015–2016.* Indomedika Pustaka.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI.* 1(2), 83–90.